



RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karuniaNya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 ini dapat disusun dengan baik. Adapun penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) TA. 2026 merupakan bagian dari Dokumen Perencanaan dari berbagai Tahapan Perencanaan sesuai dengan amanat perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pada saat penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) TA. 2026, dokumen Renstra 2025-2029 sedang disusun sehingga rancangan Renja 2026 merupakan tahun awal dalam perencanaan daerah lima tahunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan kontribusinya dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja TA 2026. Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya, Rancangan Akhir Renja TA. 2026 masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kami berharap mendapatkan masukan dan saran dari semua pihak untuk kemajuan dan kesempurnaan penyusunan dokumen perencanaan ini. Akhir kata semoga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dapat melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Sei Rampah, 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19770212 199511 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum	1
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	5
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu.....	5
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan	34
I.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	39
BAB V PENUTUP	42

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan. Untuk setiap daerah kabupaten / kota harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rancangan Akhir Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD).

Pararel dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) maka setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah. RKPD kemudian akan menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (R-APBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2026;`
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Sedangkan tujuan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan event-event nasional, pesta demokrasi, kebutuhan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai maupun perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

I.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja pada dokumen hasil Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dapat dilihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya sebagai berikut :

- BAB. I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II Hasil Evaluasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai
- BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
 - 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- BAB IV Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V Penutup

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu

Evaluasi Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sampai pada tahun 2025 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai periode 2021-2026 dan tahun awal dalam Renstra 2025-2029. Sehingga indikator yang dipakai sampai dengan akan ditetapkannya RPJMD dan Renstra yang baru masih memakai indikator lama.

Dalam mencapai sasaran yang diinginkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Hal ini selaras dengan Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sesuai dengan kodefikasi dan numenklatur terbaru.

Dalam pengelolaan belanja daerah, Satuan Polisi Pamong Praja pada awal tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.066.674.242,-. Anggaran tersebut dianggarkan sesuai kebutuhan dan target yang ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) Tahun 2024 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. Rp. 9.726.870.54,-.

Berdasarkan capaian keuangan sampai dengan triwulan ke IV, serapan anggaran diangka 96.10%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp.

9.339.252.57. Adapun realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No.	Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72.99	72.99	8.900.548.046	8.845.545.179	99,38%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	6.742.000	6.742.000	100%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	2	2	1.595.000	1.595.000	100%
I.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	5.147.000	5.147.000	100%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	%	100	100	3.230.925.070	3.202.962.154	99,13%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	21	3.159.285.070	3.132.242.154	99,14%
I.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	71.640.000	70.720.000	98,72%
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	%	100	100	103.079.576	102.891.025	99,82%

No.	Program/Kegiatan	Kinerja					Keuangan		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	12.801.450	12.801.450	100%	
I.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	16.418.266	16.418.266	100%	
I.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	10.182.000	10.182.000	100%	
I.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik selama setahun	Paket	1	1	1.836.360	1.685.400	91,78%	
I.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	13.163.500	13.163.500	100%	
I.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	48.678.000	48.640.409	99,92%	
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	100	4.000.000	4.000.000	100%	
I.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	4.000.000	4.000.000	100%	
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	%	100	100	4.838.900.000	4.835.700.000	99,93%	
I.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	6.000.000	6.000.000	100%	
I.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	6.500.000	5.000.000	76,92%	
I.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	1	1	4.826.400.000	4.824.700.000	99,96%	

No.	Program/Kegiatan	Kinerja					Keuangan		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disediakan							
I.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	716.901.400	693.250.000	96,70%	
I.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	76.685.000	73.825.000	96,27%	
I.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	523.346.400	503.055.000	96,12%	
I.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	50.000.000	49.500.000	99,00%	
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	67	67	66.870.000	66.690.000	99,73%	
		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	%	100	100	645.193.000	325.369.000	50,43%	
II.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Kertertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	90	90				
		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	%	100	100	536.805.000	218.205.000	40,65%	
II.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	Dokumen	1	1	9.000.000	9.000.000	100%	

No.	Program/Kegiatan	Kinerja					Keuangan	
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota						
II.1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	15.500.000	9.000.000	58,06%
II.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Orang	100	100	7.525.000	7.150.000	95,02%
II.1.4	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	20	20	465.505.000	154.205.000	33,13%
II.1.5	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	3	3	37.950.000	37.525.000	98,88%
II.1.6	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	1	1.325.000	1.325.000	100%

No.	Program/Kegiatan	Kinerja					Keuangan		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
II.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	90	90	108.388.000	107.164.000	98,87%	
II.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	2	2	24.620.000	24.455.000	99,33%	
II.2.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	4	4	61.508.000	60.524.000	98,40%	
II.2.3	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	22.260.000	22.185.000	99,66%	
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan pemadam kebakaran	%	100	100	181.129.500	168.338.400	92,94%	
		Persentase pelayanan non kebakaran	%	100	100				
		Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	%	30	30				
III.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Persentase pelayanan pemadam kebakaran	%	100	100	166.549.500	153.758.400	92,32%	

No.	Program/Kegiatan	Kinerja					Keuangan		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
III.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Panangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	1	7.560.000	7.560.000	100%	
III.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	17.700.000	17.700.000	100%	
III.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	12	9.000.000	9.000.000	100%	
III.1.4	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	1	4.500.000	4.500.000	100%	
III.1.5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan Analisis dalam pencegahan dan penangulangan kebakaran	Orang	2	1	6.054.000	1.310.000	21,64%	
III.1.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang	Unit	31	31	113.977.500	105.995.000	93,00%	

No.	Program/Kegiatan	Kinerja					Keuangan		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
III.1.7	Penyelenggaraan Kerjasama dan koordinasi antar Daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Sah dan Legat Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	1	7.758.000	7.693.400	99,17%	
III.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi yang dilaksanakan	%	100	100	9.000.000	9.000.000	100%	
III.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersempatkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	12	12	9.000.000	9.000.000	100%	
III.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pembentukan Relawan di desa/ Kelurahan	%	30	30	5.580.000	5.580.000	100%	
III.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	60	60	1.830.000	1.830.000	100%	
III.3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	17	17	3.750.000	3.750.000	100%	
TOTAL ANGGARAN						9.726.870.546	9.339.252.579	96,01%	

Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja terdapat 3 program dan seluruh kegiatan berjalan dengan baik meskipun terdapat pengurangan anggaran. Tingkat keberhasilan capaian kinerja didorong pada kemampuan Perangkat Daerah untuk memfokuskan kegiatan pada yang capaian kinerja masing-masing bidang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun sebelumnya (n-2) dan capaian rencana strategis dapat dilihat pada tabel 2 dan Tabel T-B4 (terlampir) sesuai dengan Formulir E.80 pada Lampiran PMDN No. 86/2017 Hal 624.

1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan an	10.000.00	0	Laporan an	0	1	Laporan an	5.147.00	1	Laporan an	5.147.00	100	10	1	Laporan an	5.147.00	16.67	51.47
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	600	%	20.733.669.128	300	%	8.610.554.075	100	%	3.230.925.070	100	%	3.202.962.154	100	99.13	400	%	11.813.516.229	66.67	57
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	Orang/bulan	20.146.659.128	64	Orang/bulan	8.445.406.765	21	Orang/bulan	3.159.285.070	21	Orang/bulan	3.132.242.154	100	98.14	85	Orang/bulan	11.577.648.919	56.67	57.47
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	587.010.000	3	Dokumen	185.147.310	1	Dokumen	71.640.000	1	Dokumen	70.720.000	100	98.72	4	Dokumen	235.867.310	66.67	40.18
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	600	%	3.060.057.615	300	%	390.047.357	100	%	103.079.578	100	%	102.891.025	100	99.82	400	%	492.938.382	66.67	16
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	236.235.315	3	Paket	39.590.787	1	Paket	12.801.450	1	Paket	12.801.450	100	100	4	Paket	52.392.237	66.67	22.18
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	450.377.300	3	Paket	96.589.128	1	Paket	16.418.266	1	Paket	16.418.266	100	100	4	Paket	113.007.394	66.67	25.09

1.05.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	281.693.900	3	Paket	27.963.060	1	Paket	10.182.000	1	Paket	10.182.000	100	100	4	Paket	38.145.060	66.67	13.54
1.05.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik selama setahun	6	Paket	193.400.000	2	Paket	13.864.000	1	Paket	1.836.360	1	Paket	1.836.360	100	91.78	3	Paket	15.549.400	50	8.04
1.05.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	227.161.100	3	Paket	55.063.750	1	Paket	13.163.500	1	Paket	13.163.500	100	100	4	Paket	68.227.250	66.67	30.03
1.05.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60	Dokumen	50.450.000	1	Dokumen	17.148.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	1	Dokumen	17.148.000	25	33.99
1.05.01. 2.06.09	Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan, Penyelesaian Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan	1.620.740.000	2	Laporan	139.828.632	12	Laporan	48.678.000	1	Laporan	48.678.000	100	99.92	4	Laporan	188.469.041	56.94	11.63
1.05.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	60	%	1.395.497.500	3	%	71.909.000	10	%	4.000.000	1	%	4.000.000	100	100	4	%	75.309.000	66.67	5
1.05.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	1.395.497.500	5	Unit	71.909.000	1	Unit	4.000.000	1	Unit	4.000.000	100	100	6	Unit	75.909.000	24	5.44

1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	60	%	26.015.800.000	3	%	13.691.209.743	10	%	4.838.900.000	1	%	4.835.700.000	100	99.93	4	%	18.526.909.743	66.67	71
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	64.000.000	3	Laporan	20.300.000	1	Laporan	6.000.000	1	Laporan	6.000.000	100	100	4	Laporan	26.300.000	66.67	41.09
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	247.800.000	3	Laporan	142.305.743	1	Laporan	6.500.000	1	Laporan	5.000.000	100	76.92	4	Laporan	147.309.743	66.67	59.45
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	25.704.000.000	3	Laporan	13.528.600.000	1	Laporan	4.826.400.000	1	Laporan	4.824.700.000	100	99.96	4	Laporan	18.353.300.000	5.56	71.4
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	60	%	7.562.105.900	3	%	1.844.590.754	10	%	716.901.400	1	%	693.250.000	100	96.7	4	%	2.537.840.754	66.67	34
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	234.840.000	3	Unit	116.519.965	1	Unit	76.685.000	1	Unit	73.825.000	100	96.27	4	Unit	190.344.965	66.67	81.05

1.05.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan • Biaya Pemeliharaan • Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69	Unit	5.376.300. 000	2	Unit	1.528.950 .269	11	Unit	523.346. 400	1	Unit	503.05 5.000	100	96 .1 2	3	Unit	2.032.0 05.269	56. 52	37. 8
1.05.01. 2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	6	Unit	623.545.9 00	3	Unit	91.554.50 0	1	Unit	50.000.0 00	1	Unit	49.500. 000	100	99	4	Unit	141.054 .500	66. 67	22. 62
1.05.01. 2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	60	Unit	1.327.420. 000	3	Unit	107.566.0 20	67	Unit	66.870.0 00	6 7	Unit	66.870. 000	100	10 0 5	1	Unit	174.436 .020	175 13. 14	
Rata Rata Capaian Kinerja %																					
Predikat kinerja																					
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	60 0	%	646.849.7 37.973	3 0 0	%	866.281.4 35	10 0	%	645.193. 000	1 0 0	%	325.36 9.000	100 100 3	50 .4 0 3	4 0 0	%	1.191.6 50.435	66. 67	0.1 8
		Persentase Gangguan Transtub yang ditangani	>5 25	%	0	1 5 5	%	0	90	%	0	9 0	0	0	100 0	2 4 5		0	46. 67	0	

1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	800	%	645.028.891.073	300	%	585.915.000	100	%	536.805.000	100	40.65	400	%	804.120.000	66.67
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan Pencegahan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	150	Laporan	637.340.000.000	82	Laporan	458.850.000	20	Laporan	465.505.000	100	33.13	100	Laporan	613.055.000	68.01

1.05.02. 2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pene	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pene	75	Lapor an	6.378.340. 000	5 4	Lapor an	84.715.00 0	3	Lapor an	37.950.0 00	3	Lapor an	37.525. 000	100	98 .8 8	5 7	Lapor an	122.240 .000	76	1.9 2
1.05.02. 2.01.03	Koordinasi Penyetinggar aan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyetingga Ketertarikan Umum, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	4	Doku men	100.962.9 48	0	Doku men	0	1	Doku men	9.000.00 0	1	Doku men	9.000.0 00	100	10 0	1	Doku men	9.000.0 00	25	8.9 1
1.05.02. 2.01.04	Pemberdayaa n Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdaya an Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	32	Doku men	257.050.0 00	2 0	Doku men	42.350.00 0	1	Doku men	15.500.0 00	1	Doku men	9.000.0 00	100	58 .0 6	2 1	Doku men	51.350. 000	65. 63	19. 98

1.05.02. 2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya terutama, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya terutama, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	30 0	Orang	913.423.0 00	0	Orang	0	10 0	Orang	7.525.00 0	1 0 0	Orang	7.150.0 00	100	95 .0 2	1 0 0	Orang	7.150.0 00	33. 33	0.7 8
1.05.02. 2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkade	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkade	3	Lapor an	39.115.12 5	0	Lapor an	0	1	Lapor an	1.325.00 0	1	Lapor an	1.325.0 00	100	10 0	1	Lapor an	1.325.0 00	33. 33	3.3 9
1.05.02. 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan Bupati/Wai Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	52 5	%	1.236.908. 000	2 5 0	%	280.366.4 35	90	%	108.388. 000	9 0	%	107.16 4.000	100	98 .8 7	3 4 0	%	387.530 .435	64. 76	31
1.05.02. 2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perka da kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	3	Lapor an	180.000.0 00	1	Lapor an	27.701.00 0	2	Lapor an	24.620.0 00	2	Lapor an	24.455. 000	100	99 .3 3	3	Lapor an	52.156. 000	100	28. 98

1.05.02. 2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	72	Lapor an	891.450.0 00	3 6	Lapor an	60.595.00 0	12	Lapor an	22.260.0 00	1 2	Lapor an	22.185. 000	100	99 .6 6	4 8	Lapor an	82.780. 000	66. 67	9.2 9
1.05.02. 2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60	Lapor an	165.455.0 00	3 2	Lapor an	192.070.4 35	4	Lapor an	61.508.0 00	4	Lapor an	60.524. 000	100	98 .4	3 6	Lapor an	252.594 .435	60	152 .66
1.05.02. 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipi (PPNS) Kabupaten/Ko ta	Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan PPNS	60 0	%	583.938.9 00	0	%	0	10 0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0

1.05.04.201	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Kebaka	Persentase Penanganan Bahaya Kebakaran	600	%	2.040.780.000	3000	377.070.018	100	%	166.549.500	100	153.758.400	100	92,32	400	%	530.828.418	66,67	26
1.05.04.201.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Panangulangan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4	Dokumen	163.755.000	0	0	1	Dokumen	7.560.000	100	7.560.000	100	100	1	Dokumen	7.560.000	25	4,62
1.05.04.201.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	72	Laporan	231.025.000	36	114.145.000	12	Laporan	17.700.000	100	17.700.000	100	100	48	Laporan	131.845.000	66,67	57,07

1.05.04. 2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Keselamatan Perugas Piket dan Penyelamatan n/Evakuasi Saat Peningkatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Doku men	220.000.0 00	2	Doku men	4.500.000	12	Doku men	9.000.00 0	1 2	Doku men	9.000.0 00	100	10 0	1 4	Doku men	13.500. 000	116 .67	6.1 4
1.05.04. 2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3	Doku men	22.000.00 0	0	Doku men	0	0	Doku men	0	0	Doku men	0	0	0	0	Doku men	0	0	0

1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (setiap Tahun), Sah, dan Legal	3	Doku men	48.000.000	0	Doku men	0	1	Doku men	4.500.000	100	100	1	Doku men	4.500.000	33.338	9.38
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sehat dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12	Unit	1.210.000.000	2	Unit	258.425.018	31	Unit	113.977.500	93	100	3	Unit	364.420.018	275	30.12

1.05.04. 2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan Analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	6	Orang	96.000.00 0	0	Orang	0	2	Orang	6.054.00 0	1	Orang	1.310.0 00	50	21 .6 4	1	Orang	1.310.0 00	16. 67	1.3 6
1.05.04. 2.01.18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	6	Dokumen	50.000.00 0	0	dokumen	0	1	Dokumen	7.758.00 0	1	Dokumen	7.693.4 00	100	99 .1 7	1	Dokumen	7.693.4 00	16. 67	15. 39
1.05.04. 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi yang dilaksanakan	60 0	%	27.084.15 9	3 0 0	%	17.550.00 0	10 0	%	9.000.00 0	1 0 0	%	9.000.0 00	100 0 0	4 0 0	%	26.550. 000	66. 67	98	

1.05.04. 2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/G edung /Lingkungan yang Dipersyaratk an Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6	Doku men	27.084.15 9	3	Doku men	17.550.00 0	12	Doku men	9.000.00 0	1 2	Doku men	9.000.00 00	100	10 0 0	1 5	Doku men	26.550.000 000	250	98. 03
1.05.04. 2.04	Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Percentase Pembentukan desa/ kelurahan	14 0	%	1.068.300. 000	2 0	%	0	30	%	5.580.00 00	3 0	%	5.580.00 00	100	10 0 0	5 0 0	%	5.580.00 00	35. 71	1
1.05.04. 2.04.01	Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatka n Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 0	Orang	546.300.0 00	0	Orang	0	60	Orang	1.830.00 00	6 0	Orang	1.830.00 00	100	10 0 0	6 0 0	Orang	1.830.00 00	20	0.3 3
1.05.04. 2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/kelura han yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	12 2	Desa/ Kelura han	522.000.0 00	4 8	Desa/ Kelura han	0	17	Desa/ Kelura han	3.750.00 00	1 7	Desa/ Kelura han	3.750.00 00	100	10 0 0	6 5	Desa/ Kelura han	3.750.00 00	53. 28	0.7 2

Arah kebijakan pada tahun berjalan mulai dari tahun 2018 sejak diterbitkannya Permendagri No 100 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengakibatkan focus kegiatan Perangkat Daerah mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang dirasa kurang mendukung mendapatkan porsi anggaran sedikit dan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Didalam pelaksanaan tugasnya yang merupakan tugas rutin dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, maka target yang dibuat haruslah target yang maksimal yakni 100%, sehingga dengan demikian pekerjaan rutin tersebut menciptakan suasana yang kondusif sehingga jalannya pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Target pencapaian SPM pada tahun 2024, yaitu :

Tabel 3
Target SPM Trantibum Linmas 2024

No	Jenis Pelayan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Target	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target
T1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%

Dalam rangka pencapaian SPM maka terdapat program kegiatan yang perlu untuk dilanjutkan yaitu penyediaan sarana dan prasarana trantibum dan pemadam kebakaran. Sehingga sampai dengan akhir 2024, capaian SPM yang dilaksanakan Adalah sebagai berikut

Tabel 4
Realisasi Capaian SPM 2024
Trantibum Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Pencapaian/Output		Realisasi
1	Pelayanan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum					96.67%
a.	Jumlah yang dilayani (80%)					80%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Satuan	Jumlah Total yang dilayani	Jumlah Total yang terlayani	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Pencapaian/Output		Realisasi
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		Orang	104	104	100%
b.	Jumlah Mutu/ Barang/ SDM (20%)					16.67%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar		Satuan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	83.3%
	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)		Unit	25	25	100%
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)		Dokumen	12	12	100%
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)		Orang	20	20	100%
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)		Dokumen	1	0	0%
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)		Orang	0	0	100%
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)		Orang	0	0	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					100%
a.	Jumlah yang dilayani (80%)					80%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Satuan	Jumlah Total yang dilayani	Jumlah Total yang terlayani	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Orang	43	43	100%
b.	Jumlah Mutu/ Barang/ SDM (20%)					20%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar		Satuan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Pencapaian/Output		Realisasi
					tersedia	
	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	34	34	100%	
	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1	1	100%	
	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	6	6	100%	
	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	1	1	100%	
	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	34	34	100%	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0	0	100%	

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 2 target SPM yang diampu oleh Satpol PP dalam urusan Trantibum Linmas, satu target belum tercapai dan satu target telah tercapai. Adapun target yang belum tercapai dengan nilai 96.67 % terdapat capaian yang belum bisa dimaksimalkan capaiannya, yakni dokumen Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan). Hal ini dikarenakan belum mampunya Perangkat Daerah untuk dapat mengintegrasikannya kedalam aturan di Kabupaten dan belum dapat dianggarkan dalam kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran. Hal ini dapat menjadi catatan kedepannya untuk dapat menjadi perhatian bersama sehingga SPM yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan ditahun mendatang.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Indikator Kinerja yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun capaian kinerja dalam indikator kinerja utama dalam 5 (lima) tahun dapat dilihat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sergai
TA. 2024

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Satuan Polisi Pamong Praja					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	0.98	0.975	99.49
2	Persentase kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	95	95	100
3	Persentase pelayanan pemadam kebakaran dan non Kebakaran	%	100	100	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72.99	72.99	100
2	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	%	100	100	100
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	90	90	100
4	Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran	%	100	100	100
5	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	%	30	30	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan non kebakaran	%	100	100	100

Dilihat dari tabel diatas, bahwa secara keseluruhan capaian target pelayanan sudah tercapai, hal ini dapat dijadikan Dasara dalam menyusun capaian kinerja dimasa mendatang terutama di tahun 2026 yang sudah menyesuaikan dengan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029.

I.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serdang Bedagai adalah menyangkut kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terkait permasalahan-permasalahan seperti penyalahgunaan ijin, pelanggaran peraturan, kejadian politik praktis/ aksi unjuk rasa dan lain sebagainya.

Pada tahun 2025, Kabupaten Serdang Bedagai dihadapkan dengan pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Untuk itu, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana potensi konflik dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi. Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan SKPD dimaksud antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil polisi pamong praja yang tidak sebanding dengan tingginya tingkat permasalahan yang harus dihadapi.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparat;
3. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya dukungan dari instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah;
4. Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Belum meratanya pemahaman tugas pokok dan fungsi aparat Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

6. Belum optimalnya sistem penegakan perda secara preventif (pendekatan masyarakat) untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dikarenakan upaya penegakan perda yang dilakukan selama ini masih bersifat represif sehingga banyak menimbulkan banyak perlawanan dan penolakan dari masyarakat;
7. Belum sebandingnya resiko kerja atau beban tugas yang dilakukan, berkaitan dengan hak perlindungan dan keselamatan bagi anggota Satpol PP karena harus berhadapan dengan aksi perlawanan dan ancaman kekerasan dari pelanggar perda.
8. Masih kurangnya kegiatan-kegiatan linmas yang diakomodir dalam renstra Dinas Satpol PP dikarenakan keterbatasan anggaran.

Berkaitan dengan isu-isu penting serta kendala permasalahan yang akan dihadapi, maka diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi serta melakukan upaya kerjasama antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Perda melalui kegiatan Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya, Rapat-rapat koordinasi secara berkala tentang penegakan Perda dan Perkada di kabupaten.
2. Menambah jumlah PPNS melalui usulan Diklat PPNS di lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan keterampilan dan kesamaptaan anggota Polisi Pamong Praja melalui pelatihan.
4. Mengupayakan memasukkan kegiatan-kegiatan Linmas dalam Rencana Kerja
5. Melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/ operasional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

Dari prioritas pada tersebut, maka dapat diturunkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perangkat daerah tahun 2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan dalam pencapaian sasaran yang akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan dalam mendukung visi dan misi. Sesuai dengan RPJMD 2025-2029 serta Renstra Perangkat Daerah yang sedang dalam penyusunan, namun untuk tahun 2026 telah mengintegrasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2025-2029 dan Rancangan Akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029.

Didalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih 2025-2029 maka keterkaitan dalam pelaksanaan Visi: ***Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan Untuk Serdang Bedagai Maju, Tangguh dan Berkelanjutan*** dengan tagline “DAMBAAN MANTAB”, maka dari 5 misi yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terhubung dengan Misi ke 4. Misi-4 yakni Meningkatkan keamanan daerah, masyarakat demokratis dan stabilitas ekonomi serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pada misi ke empat ini, terdapat 3 tujuan strategis yang ingin dicapai, dimana peran serta Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai terdapat pada tujuan pertama yakni dalam rangka terciptanya keamanan daerah dan masyarakat demokratis, dengan indikatornya Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dapat ditetapkanlah sasaran yang akan dicapai oleh kabupaten yaitu Terciptanya Masyarakat demokratis dan lingkungan aman. Indikator yang dipakai adalah Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan dalam dokumen Perencanaan, sasaran kabupaten menjadi tujuan yang akan dicapai oleh perangkat daerah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

Tujuan :

Meningkatnya kondisi lingkungan yang aman dan tertib

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Trantibum
2. Meningkatnya pelayanan kebakaran dan non kebakaran

Rumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dapat diuraikan kedalam tabel berikut :

Tabel 6
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terciptanya masyarakat demokratis dan lingkungan aman	Meningkatnya kondisi lingkungan yang aman dan tertib		Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan	95	98	99	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Trantibum	Persentase Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	90	95	98	99	100	100
		Meningkatnya pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sehubungan dengan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2026, sebagai tahun maka program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah juga akan diarahkan dalam mendukung perwujudan tema tersebut. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Kepala Daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis yang telah dirumuskan berdasarkan kebijakan umum.

Pada bagian ini disajikan semua program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 setelah Pemutahiran. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran. Program dan kegiatan pada bagian ini dibuat untuk tahun 2026. Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan target kinerja untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai dan disertai pagu indikatif pendanaan. Kebutuhan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan percepatan pencapaian program kerja Kepala Daerah serta mempertimbangkan ketercapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Adapun pagu indikatif yang dirancang untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 10.774.721.288, - dimana komposisi Dana DBHCHT sebesar Rp.32.409.700,-dan DAU sebesar Rp. 10.742.311.588,-

Pada tahun 2026, direncanakan terdiri dari 3 Program, 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah
 - 1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
 - 1.2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas
 - 1.4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengakhiran.
 - 1.5. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ktertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 1.6. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 2.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - 2.2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - 2.3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ walikota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negei Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota
 - 3.1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.1. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - 1.2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
 - 1.3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.
 - 1.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 1.5. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
 - 1.6. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - 2.1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 3.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - 3.2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - 4.1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyusunan Rencana Kerja TA. 2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Secara lengkap program dan kegiatan tersebut disajikan pada Tabel berikut.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REKJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL	DAERAH						
																12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.774.721.288,00								8.965.800.000,00		
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERANGAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.774.721.288,00								8.965.800.000,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA						10.313.498.588,00								8.385.800.000,00		
1.05.01.2.01		[Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan]	Nilai SAMP Perangkat Daerah	80,00	72,99	73,52	74,65	10.313.498.588,00	-			-				8.385.800.000,00		
		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian, Penganggaran dan evaluasi yang disusun	-			5 Kegiatan	3.395.000,00				Memperkuat di bidang Pencapaian, Penganggaran, dan hak asasi manusia (HAM).		Perangkat Daerah		3.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.595.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Perangkat Daerah		1.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi/ Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.800.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Perangkat Daerah		2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA RENJA TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.2.02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang diserahkan	-	-	-	2 Dokumen	4.872.018.000,00	Kab. Sintang Kecamatan, Semua KetDesa	-	-	Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terdapatnya kehidupan yang Lebih Aman dan Terbuka DEMOKRATISASI, BERKEADILAN DAN RAMAH LIHAT NGKUNGA	Perangkat Daerah	-	3.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	57 Orang/bulan	4.797.518.000,00	Kab. Sintang Kecamatan, Semua KetDesa	-	-	Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terdapatnya kehidupan yang Lebih Aman dan Terbuka DEMOKRATISASI, BERKEADILAN DAN RAMAH LIHAT NGKUNGA	Perangkat Daerah	-	3.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Praktek Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	1 Dokumen	84.500.000,00	Kab. Sintang Kecamatan, Semua KetDesa	-	-	Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terdapatnya kehidupan yang Lebih Aman dan Terbuka DEMOKRATISASI, BERKEADILAN DAN RAMAH LIHAT NGKUNGA	Perangkat Daerah	-	90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang diterima	-	-	-	8 Kegiatan	97.000.000,00	-	-	-	Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perangkat Daerah	-	113.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	12.000.000,00	Kab. Sintang Kecamatan, Semua KetDesa	-	-	Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perangkat Daerah	-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN RESTRUKTUR OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGUET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGUET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH			TARGUET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Paket Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (P-HAM).	-	Perangkat Daerah		18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0003		Penyediaan Perawatan Rumah Tangga				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (P-HAM).	-	Perangkat Daerah		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (P-HAM).	-	Perangkat Daerah		8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (P-HAM).	-	Perangkat Daerah		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	42.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (P-HAM).	-	Perangkat Daerah		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Misk Daerah yang Pemeliharaan Daerah				2 Kogalan	20.000.000,00		-	-	-	-		28.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07.0008		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Uthi	15.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Uthi	15.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TANGGUNG JAWAB OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Ruang Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	-	-	-	8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disusun				3 Laporan	4.878.985.500,00			-	-	-	-	4.154.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.00.0001		Penyediaan Jasa Sumbat Merajut														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumbat Merajut				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	-	-	-	8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.00.0002		Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	-	-	-	4.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.00.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.899.595.500,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALKHASI UMUM (DAU)	-	Terselenggaranya kegiatan yang Lebih Aman dan Terlibat	-	-	4.141.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan				4 Kegiatan	442.100.000,00			-	-	-	-	497.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperawatan dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	-	-	-	52.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperawatan dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya				10 Unit	371.100.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	-	-	-	420.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperawatan				25 Unit	16.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	-	-	-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKURSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKURSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET 2027		PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	1.05.01.2.00.0009	Penelitian/Rahubalasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direnovasi					1 Unit	3.000.000,00	Kab. Sintang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETERTERANGAN DAN KETERLIBATAN UMUM						277.222.700,00								246.000.000,00	
			[Meningkatkan penyediaan gangguan keterlibatan dan keterlibatan umum]	100	100	100	100	277.222.700,00									246.000.000,00	
1.05.02.2.01			Peningkatan Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				15 Kegiatan	175.813.000,00						Masyarakat			151.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi/ Penyelenggaraan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum dan Peningkatan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						4.500.000,00	Kab. Sintang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	-			Masyarakat			14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0003			Koordinasi Penyelenggaraan/Kelembagaan dan Keterlibatan Umum serta Peningkatan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi/ Penyelenggaraan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum dan Peningkatan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															
			[Meningkatkan Peningkatan terhadap masyarakat]	100	-	0	100	277.222.700,00									246.000.000,00	
1.05.02.2.01.0004			Pemberdayaan Peningkatan Masyarakat dalam rangka Keterlibatan dan Keterlibatan Umum															
			Jumlah Dokumen yang Menyediakan Peningkatan Masyarakat dalam rangka Keterlibatan dan Keterlibatan Umum				1 Dokumen		4.500.000,00	Kab. Sintang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	-			Masyarakat			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			[Meningkatkan penyediaan gangguan keterlibatan dan keterlibatan umum]	100	100	100	100	277.222.700,00									246.000.000,00	
1.05.02.2.01.0014			Peningkatan Kapasitas SCM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Polisi															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELONPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
																12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	16.961.700,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI, HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terdapatnya kehidupan yang lebih Arhan dan Terbto DEMOKRA TISASI, BE RKEBUDA YAAH DAN RAMAH LU NGKUNGA N	Masyarakat		13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0011	Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				5 Laporan	43.448.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI, HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terdapatnya kehidupan yang lebih Arhan dan Terbto DEMOKRA TISASI, BE RKEBUDA YAAH DAN RAMAH LU NGKUNGA N	Masyarakat		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Memperkuat oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		Masyarakat		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		[Meningkatkan kapasitas SDM PPNS]	Persentase PPNS yang Dilaksanakan Kompetensinya	100	0	0	100	277.222.700,00							246.000.000,00		
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS yang dilaksanakan				1 Kegiatan	30.000.000,00			Memperkuat oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PNS			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Kinerja PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai PPNS Peringkat Pende				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Memperkuat oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PNS			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1.65.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						184.000.000,00							334.000.000,00	
		[Menyalurkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	184.000.000,00							334.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadatan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kebudayaan Kota	Jumlah Kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran yang diaksanakan				60 Kegiatan	128.000.000,00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		Masyarakat		251.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kestegangan Petugas Pijet dan Penyelamatan (Evakuasi) Sesuai Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran					1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Sintang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		Masyarakat		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0005	Standarisi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Set, dan Logat					1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Sintang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		Masyarakat		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Kejuruan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					3 Orang	12.000.000,00	Kab. Sintang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		Masyarakat		13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Seri dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertak					6 Unit	82.000.000,00	Kab. Sintang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		Masyarakat		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kombran dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

Doc-01 - akorak pada 2025-09-05 11:53:46

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serang Bedugul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tercapainya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tenet DEMOKRA TISASI, BE RKEBUJA YAAH DAN RAMAH LI NGKUNGA N	Masyarakat		8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.04.2.01.0026		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	184.000.000,00	-	-	-	-	-	-	334.000.000,00	-	
			Jumlah Laporan Hasil Penanganan Kegiatan Kelembagaan Protokol dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	18.000.000,00	Kab. Serang Bedugul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Masyarakat			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.04.2.02		[Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan korban kebakaran]	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	184.000.000,00	-	-	-	-	-	-	334.000.000,00	-	
		Inspesi Penertiban Protokol Kebakaran	Jumlah Kegiatan Inspeksi/ penertiban protokol kebakaran yang dilaksanakan	-			12 Kegiatan	9.000.000,00	-	-	Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Masyarakat		-	12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.04.2.02.0001		Pendidikan Samudra Pesisir dan Perikanan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Banjir/Gempa/ Badai dan Penyakit yang Dipengaruhi oleh Meningkatkan Status Meningkatkan Status Kebakaran				1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Serang Bedugul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Masyarakat			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		[Meningkatkan layanan pencegahan kebakaran]	Persentase penyebaran informasi dan edukasi rentan kebakaran	60	15	20	20	184.000.000,00	-	-	-	-	-	-	334.000.000,00	-	
1.05.04.2.04		Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan pembudayaan masyarakat yang dilaksanakan	-			17 Desa/ Kecamatan	38.000.000,00	-	-	Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Masyarakat		-	56.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.04.2.04.0001		Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRATA TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TAHUN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendukung Swakelola Ekstasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Setiap Tahunnya	30 Orang	8.000.000,00	Kab. Sintang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KotDesa					Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (P-HAM).	Masyarakat			9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.04.2.04.0002		Pembentukan dan Pembiayaan Relawan Pemuda Katakarn	Jumlah Desa/Kelurahan yang berstruktur dan Terdiri Relawan Pemuda Katakarn yang ada Lengkapnya	48 Desa/Kelurahan	30.000.000,00	Kab. Sintang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KotDesa					Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (P-HAM).	Masyarakat			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		[Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	184.000.000,00							334.000.000,00			
1.05.04.2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Korban Menderita Penyakit Menular	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Korban menderita Penyakit Menular	6 Kegiatan	9.000.000,00						Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (P-HAM).	Masyarakat			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.04.2.05.0001		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menyimpang, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang Mencegah dan Meniadakan Bahaya Manusia	1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Sintang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua KotDesa					Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (P-HAM).	Masyarakat			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		J U M L A H														8.965.000.000,00		

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2026 disusun, dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD sebelumnya dan mengacu pada penyusunan Rencana Akhir RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam menyingkapi perubahan peraturan dan masa transisi pada perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah berpengaruh pada program dan kegiatan Rencana Kerja 2026 agar dapat menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi Masyarakat.

Demikianlah Rancangan Rencana Kerja TA 2026 disusun dan kiranya dapat menjadi petunjuk dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) TA 2026 dimasa mendatang.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19770212 199511 1 001